

Diskusi

Redaksi mengundang pembaca untuk mengisi rubrik "Diskusi" guna menanggapi secara kritis akademis satu artikel atau lebih yang dimuat dalam jurnal UNISIA edisi (nomor) sebelumnya. Panjang tulisan lebih kurang 13.000 karakter (Red).

Kritik Intelektualisme dalam Wacana Politik

A. Wisnuhardana

Tatkala Presiden Soeharto beberapa waktu lalu menyatakan bahwa hampir kebanyakan analisis terhadap suatu permasalahan atau gejala sosial justru tidak membantu penyelesaian masalah yang terjadi, pernyataan itu hampir-hampir sepi tanggapan dari kaum intelektual atau ilmuwan (terutama) sosial. Kalaupun ada respon dan tanggapan, suaranya hanya sayup-sayup terdengar di kejauhan dan kemudian lenyap ditelan oleh kenyataan atau masalah lain. Faktor psikologiskah? Keamanan? Keselamatan diri? Semuanya mungkin! Boleh jadi juga, lemahnya respon tersebut memberi indikasi bahwa kaum intelektual pada dasarnya —sadar atau tidak sadar— sepakat dan membenarkan pernyataan tersebut. Dan kalau demikian halnya yang terjadi, sebenarnya iklim sehat yang diperlukan bagi perkembangan ilmu sosial telah terganggu habis oleh ruang-ruang politik yang dikembangkan sedemikian *massive* oleh negara.¹

Dengan demikian, "eksodus" intelektual kritis semacam Arief Budiman, George Junus Aditjondro, Ariel Heryanto ke luar negeri pun, amat bisa dipahami dalam konteks tidak adanya lagi ruang ilmiah untuk menciptakan kultur kritis dan eksperimentatif

dalam ruang politik yang dikendalikan oleh mekanisme politik yang kaku dan otoriter.² Sebuah metafora yang pas untuk menggambarkan situasi semacam ini pernah dibuat oleh Pramoedya Ananta Toer dalam salah satu tetraloginya berjudul Rumah Kaca.³ Kita semuanya hidup seolah-olah dalam rumah kaca yang dikendalikan oleh kekuatan lain, yang selalu memantau dan mengawasi gerak-gerik kita ke manapun

¹Dalam artikelnya di Harian KOMPAS, Otto Syamsudin Ishak mengatakan bahwa negara merumuskan definisi-definisi tertentu yang diistilahkannya dengan *definisi situasi*, untuk memenjarakan wacana publik yang merongrong kepentingan negara. Definisi situasi ini bisa dikenakan pada siapapun termasuk intelektual. Seiring dengan perkembangan kesadaran masyarakat, muncul definisi situasi alternatif sebagai penolakan atas pendefinisian oleh negara. Dalam konteks sosial politik Indonesia sendiri, istilah negara dan pemerintah menjadi sesuatu yang rancu sehingga dalam tulisan ini bisa dipertukarkan satu sama lain.

²Pengamatan jeli atas fenomena ini saya temukan dalam tulisan A. Bagus Laksana untuk Majalah Kebudayaan BASIS.

³lihat Pramoedya Ananta Toer, *Rumah Kaca*, Hasta Mitra, Jakarta.

kita pergi. Ironisnya, kepergian beberapa intelektual ini tidak mendapat banyak sorotan atau pembelaan dari kolega mereka sendiri, kalangan intelektual. Seolah-olah nasib buruklah yang telah menepikan intelektual semacam mereka dalam struktur atau tatanan sosial politik Indonesia.

Kebuntuan ilmu-ilmu sosial dalam *dis-course* di ruang politik dalam menghadapi gempuran bertubi-tubi dari kalangan politisi (terutama politisi dan aparatusnya yang berada di sayap negara) lebih dikarenakan kaum ilmuwan sosial di Indonesia saat ini tidak melakukan kegiatan politik praktis yang berurusan dengan mekanisme pengelolaan kekuasaan dan *share* kekuasaan, pembentukan opini publik untuk tawar-menawar kekuasaan dan pembangunan kesadaran kritis massa dan sebagainya, melainkan bergerak pada level teoretis-abstract. Ilmuwan sekarang disibukkan dengan berbagai kegiatan seminar, publikasi ilmiah, penelitian, memberi penataran atau kursus, mengadakan pelatihan ini itu dan sebagainya. Ignas Kleden memberikan deskripsi untuk membedakan keadaan ini dengan memperbandingkan generasi Soekarno-Hatta-Sjahrir-Tan Malaka dengan generasi ilmuwan sosial sekarang ini. Generasi angkatan Soekarno melakukan analisis sosial sebagai dasar bagi tindakan politik yang mereka lakukan, sedangkan generasi ilmuwan sosial sekarang melakukan analisis sekadar untuk mengimbangi terbatasnya ruang untuk aktivitas dan ekspresi politik. Soekarno dan kawan-kawan membuat analisis sosial karena berpolitik, generasi ilmuwan sosial sekarang menjalankan analisis sosial justru karena tidak berpolitik.⁴

Orde Baru dan Posisi Intelektual

Tulisan Susetiawan dan Nasikun, memiliki *domain* yang sama yaitu masyarakat Orde Baru, yang ditata melalui mekanisme

reproduksi ideologi yang bersifat distingtif —yakni membedakan Orde Baru dengan Orde Lama, di mana yang lama dianggap jelek, tidak konstitusional, menyebabkan kemelaratan dan kemiskinan, telalu berorientasi politik, dan sebagainya sedangkan yang baru (berjanji untuk) konstitusional, menghapus kemelaratan dan kemiskinan, dan tidak menjadikan politik sebagai panglima— sehingga pada mulanya dengan cepat memperoleh dukungan dari masyarakat yang sudah jenuh dengan situasi sebelumnya. Berbagai kemacetan yang terjadi akibat pergolakan politik berdarah di tahun 1965 yang diiringi dengan kesulitan ekonomi yang dijalankan Soekarno, digunakan oleh rezim yang baru untuk memperoleh dukungan dari rakyat.

Kalau Susetiawan menjadikan ideologi stabilitas yang monotafsir sebagai alat legitimasi bagi tindakan negara untuk menghilangkan kritik sosial dan konflik, Nasikun meninjau posisi cendekiawan dalam pembangunan (Negara Orde Baru) sebagai pintu untuk membuka adanya domesfitikasi (penjinakan) terhadap peran cendekiawan. Ia memberikan ilustrasi mengenai Proyek Camellot di Amerika Serikat sebagai sumber inspirasi bagi suatu refleksi kritis, bagaimana seharusnya cendekiawan menempatkan diri dalam kebijakan-kebijakan politik. Satu kata kunci yang kemudian mempertemukan cara pandang Nasikun dan Susetiawan adalah pembangunan. Yang satu mempersoalkan legitimasi yang dijalankan oleh Orde Baru melalui mekanisme penciptaan institusi sosial politik ekonomi yang pengap dan tidak demokratis, yang lain mempersoalkan kepengapan atmosfer yang

⁴lihat paper Ignas Kleden, "Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia: Menghadapi Intelektualisme Bazar", disampaikan dalam *Peringatan 80 Tahun Prof. Dr. Selo Soemardjan*, Hotel Santika Yogyakarta, 17-18 Juli 1995.

harus dihirup oleh kalangan intelektual dalam menjalankan fungsi kritisnya tersebut.

Dari kedua cara berpikir semacam itu, tulisan ini mau melihat perspektif lain dari sebuah kritik sosial dalam rangka menciptakan ruang publik yang lebih segar, terbuka dan demokratis sebagai sebuah cita-cita tumbuhnya masyarakat sipil yang sejajar posisinya dengan perangkat kekuasaan yang dimiliki oleh negara.

Berangkat dari pendekatan Antonio Gramsci —seorang intelektual dan aktivis partai di Italia— mengenai pentingnya menumbuhkan intelektual organik (*organic intellectuals*), persoalan yang mencolok di depan mata kita sebagai sebuah bangsa adalah terjerembabnya kaum intelektual dalam wacana yang dihadirkan oleh negara. Kalau diamati lebih teliti, spektrum yang dihasilkan oleh pemikiran intelektual tidak menunjuk pada satu fokus yang sama yakni kritik atas persoalan relasi antara struktur kekuasaan di satu pihak dengan masyarakat di pihak lain, tetapi tertuju pada segala macam fenomena sosial, tanpa pernah secara khusus melibatkan diri dalam fokus persoalan ketimpangan relasi sosial negara-masyarakat serta cara-cara memperbaikinya. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan lambatnya pertumbuhan intelektual yang secara ideologis ataupun pemikiran berada pada pihak yang membela masyarakat dan berjuang membentuk masyarakat sipil yang kuat. Kalau hendak dipertajam lagi, intelektual kritis yang muncul kemudian pun tidak mampu melibatkan diri secara langsung dalam pergulatan membangun kesadaran masyarakat melalui jalan kekuasaan. Pada hemat saya, cara semacam ini tidak saja melemahkan gerakan intelektual sebagai gerakan penyadaran masyarakat tetapi juga semakin memperkuat posisi negara. Akibatnya, seluruh kerja intelektual, meminjam istilah George Junus Aditjondro, tidak lebih dari sekadar onani

intelektual. Dalam seluruh situasi semacam itu, hanya ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh seorang intelektual: bunuh diri kelas atau tetap melakukan onani intelektual dengan melakukan praksis pada tingkat teoritis dan abstrak.⁵

Dalam kerangka emansipasi, setiap manusia dan individu —dan dengan demikian secara kelompok pula— memiliki kepentingan emansipatoris untuk membebaskan diri dari hambatan-hambatan ideologis yang ditimbulkan oleh kekuasaan melalui perantaraan kekuasaan itu sendiri. Kepentingan ini dapat mewujudkan diri dalam pengetahuan analitis yang disistematisasikan secara metodis menjadi ilmu sosial yang kritis.⁶ Demi kepentingan proses pematangan diri masyarakat dan pembentukan kesadaran kritis itu, ilmuwan sosial dalam memberikan analisisnya tidak semata-mata mendeskripsikan norma atau struktur sosial melainkan memberikan *insight* atau pencerahan bagi kesadaran baru tersebut.

Dalam kerangka emansipasi itu pula, agenda terpenting dalam melakukan kritik sosial adalah mempersiapkan tata aturan sosial yang baru sebagai *counter* atas tatanan sosial lama. Bagaimanapun, kritik sosial tidak akan mencapai sasaran dan justru termarginalisasi dalam ruang sosial yang ada, kalau ia tidak menciptakan alternatif baru dalam pengorganisasian masyarakat. Kritik dan tindakan sosial yang tidak berorientasi pada penciptaan tatanan baru sebagai fokus utama justru hanya akan melindungi identitas sistem yang te-

⁵lihat George Junus Aditjondro, artikel "Kaum Intelektual Kita Pilih Bunuh Diri Kelas atau Onani", *Anarki Kepatuhan*, LKIS, Yogyakarta, 1996, hal 118-125.

⁶Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi*, Kanisius, 1990, hal 193

ngah berlaku.⁷

Akan tetapi, logika pemikiran semacam itu di Indonesia pun seringkali mengalami jalan buntu. Seringkali intelektual yang mencoba untuk memberikan kritik dengan cara memasuki struktur kekuasaan dan dari sana melakukan tindakan koreksi justru terjungkal ketika ia sudah menunjuk pada kritik terhadap pusat kekuasaan. Pembelaan dan logika sekuat apapun tidak cukup mampu menjadi senjata ampuh bagi perjuangan melalui model pilihan perjuangan struktural semacam itu.⁸ Solusi atas persoalan yang lingkaran-melingkar ini kiranya perlu untuk diperdebatkan dan diangkat ke dalam ruang publik yang lebih luas dan melibatkan banyak pihak. Mengapa? Salah satu tindakan alternatif untuk menciptakan intelektual organik adalah mendorong setiap kelas masyarakat merumuskan masalah mereka sendiri, lalu secara bersama-sama dengan kelas yang lain melakukan aliansi untuk mengetuk pintu dialog dengan negara, yang hingga saat ini masih tertutup rapat. Dorongan untuk menciptakan tradisi pemecahan masalah ini secara politis memiliki peran penting karena analisis sosial dan pendekatan teoritis yang diajukan senantiasa merupakan analisis sosial terlibat (*involving social analysis*). Pendekatan ini pernah digunakan oleh para praktisi pendidikan alternatif di Amerika Latin yang dipelopori oleh Paulo Freire.⁹ Masyarakat buta huruf di Amerika Latin diajarkan baca tulis, pertama-tama untuk kepentingan mereka sendiri dan kemudian secara politik digunakan untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan dalam proses pemilu, karena pemilu di kebanyakan negara Amerika Latin mensyaratkan kemampuan baca tulis bagi para pemilihnya.

Tentu saja gerakan ini harus dilakukan dengan dua mata tombak, yakni kultural dan politik. Dalam bidang politik, persoalan terpenting adalah bagaimana menarik ka-

langan intelektual yang ada untuk lebih mau terlibat dalam persoalan politik yang riil. Memang dirasakan sampai saat bahwa regulasi dan aturan hukum yang berlangsung tidak memberi kemungkinan untuk terciptanya partisipasi politik langsung dari masyarakat, karena sebagaimana yang dijelaskan di atas dan juga ditegaskan Susetjawan, segalanya masih berada dalam kendali negara yang didukung oleh aparaturnya, terutama militer.

Dalam bidang kultural, tradisi peredaran budaya melalui media massa dan sistem pendidikan secara efektif membantu terbentuknya konsensus-konsensus baru dalam masyarakat yang berkembang seperti sekarang.¹⁰ Cara ini pulalah yang

⁷Larry J. Ray, *Rethinking Critical Theory, Emancipation in the Age of Global Social Movements*, Sage Publications, London, 1993 hal. 67-68.

⁸Salah satu contoh aktual untuk menunjukkan fenomena ini adalah terdepaknya Dr. Amien Rais, ketua umum Muhammadiyah dari posisi Ketua Dewan Pakar ICMI. Dalam pemberitaan di media-media alternatif ataupun di internet, terdapatnya Amien dari posisi itu disebabkan oleh kritik-kritiknya yang tajam tentang penambangan emas di Busang, Kalimantan Timur dan tembaga di Freeport, Tembaga-pura, Irian Jaya. Padahal kritik Amien tersebut pada dasarnya ingin menyelamatkan kekhayalan alam bangsa ini dari jorjoran tangan-tangan asing yang berkolusi dengan kekuasaan.

⁹Untuk memeriksa lebih jauh model pendidikan ini, lihat, Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindass*, Penerbit LP3ES, Jakarta. Lihat juga misalnya Paulo Freire and Ira Shor, *A Pedagogy for Liberations, Dialogues on Transforming Education*, Bergin & Garvey Publisher Inc, Massacusetts, 1987, hal 171 dan seterusnya.

¹⁰Nick Stevenson, *Understanding Media Cultures, Social Theory and Masss Communication*, Sage Publications, London, 1995, hal 17.

saat ini dilakukan oleh negara untuk membangun citra dirinya di hadapan masyarakat sipil dan dengan cara itu ia mengabsorpsi setiap kecenderungan gerakan yang secara diametral berhadapan dengannya. Kalau kita lihat di televisi atau di media cetak, seluruh bangunan dasar yang ditampilkan sebagai mata acara selalu merupakan realitas semu (*pseudo reality*) yang mempesonakan banyak orang, tetapi sesungguhnya menyesatkan, karena yang berlangsung adalah tipuan teknologi atau sistem kendali dan sensor atas media massa. Demikian pula halnya dengan pendidikan. Kooptasi negara atas sistem pendidikan telah melumpuhkan perjuangan terbentuknya kelas sosial yang mandiri dan kritis terhadap kekuasaan.

Keluar dari Kemelut, Mungkinkah?

Kalau pola perkembangan ilmu sosial beserta kritik-kritik yang dilahirkannya senantiasa mengikuti perkembangan intelektualisme bazar, mungkinkah ada suatu solusi—yang meskipun tentatif tetap diperlukan—dalam kerangka pemberdayaan masyarakat sipil? Salah satu ciri perkembangan intelektualisme bazar, sebagaimana dikemukakan oleh Ignas Kleden adalah kegiatan yang dilakukan tersebut begitu beragam dan banyak, tetapi satu sama lain tidak berada dalam satu kontinen yang sama, tidak saling berhubungan dan saling menunjang. Persis inilah yang sekarang terjadi dalam perkembangan intelektualisme di Indonesia. Ciri lainnya adalah kecenderungan perkembangan intelektualisme yang mengikuti hukum besi ekonomi, di mana pasar dan konsumen menjadi tujuan utama dari setiap proses dan hasil produksi seorang intelektual.

Dalam kaitannya dengan penciptaan budaya dan partisipasi politik, logika tersebut dapat diterangkan sebagai berikut.

Substansi dan wacana perkembangan pemikiran intelektual ditentukan oleh pola permainan yang dibawakan oleh negara. Kita masih ingat di tahun 1970-an ketika negara membutuhkan legitimasi religius untuk melakukan pembangunan, seluruh potensi intelektual dan religius dikerahkan ke arah itu tanpa *reserve*. Ini sekaligus memberi bukti bahwa intelektual tidak memiliki ruang bermain yang bebas dan oleh karenanya selalu menjadi reaksioner. Sementara itu, arus pertumbuhan dan daya tahan hidup intelektual amat ditentukan oleh hubungan permintaan dan penawaran dalam hukum ekonomi. Intelektual tidak mampu menciptakan kultur subsisten untuk menghidupi dirinya dan seluruh kegiatan ilmiahnya. Bisa dipastikan, yang kemudian terjadi adalah merebaknya penelitian dan analisis yang bersifat pesanan.

Pada akhirnya, kebuntuan yang terjadi dalam arus pemikiran di Indonesia harus diatasi dengan melirik jalan politik yang bersifat struktural sebagai salah satu pintu yang paling prospektif. Pintu ini bukannya tanpa risiko, karena pada detik pertama pilihan tersebut dijatuhkan, ia harus sudah berhadapan dengan kerasnya represi oleh aparat koersif struktur kekuasaan, yang tetap ingin melanggengkan *status quo*. Tetapi kemungkinan itu bukannya tidak ada dukungan sama sekali. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesumpekan dan kesesakan yang melingkupi ruang publik dirasakan oleh siapapun. Kelompok-kelompok kritis yang terus menerus melakukan upaya membuka ruang tersebut menjamur di mana-mana. Persoalannya sekarang adalah sinergisme dalam melakukan kritik sosial, sehingga fokus perhatian kita tidak lagi hanya menginterpretasi fenomena sosial yang terjadi melainkan mengubahnya. ●

Daftar Bacaan

- Budi Hardiman, Fransisco, *Kritik Ideologi*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Freire, Paulo, *Pendidikan Kaum Tertindas*, LP3ES, Jakarta.
- Freire, Paulo and Ira Shor, *A Pedagogy for Liberation, Dialogues on Transforming Education*, Bergin & Garvey Publisher Inc, Massachusetts, 1987
- Kleden, Ignas, *Kumpulan Paper Peringatan 80 tahun Selo Soemardjan*, Yogyakarta, 1995.
- Ray, Larry J, *Rethinking Critical Theory*, Sage Publications Ltd, London, 1993.
- Sumartana, Th dan Mohamad Sobary, *Anarki Kepatuhan*, LKiS, Yogyakarta, 1996.
- Stevenson, Nick, *Understanding Media Cultures, Social Theory and Mass Communication*, Sage Publications Ltd, London, 1995
- Vatikiotis, Michael RJ, *Indonesian Politics Under Soeharto: Order, Development and Pressure for Change*, Roudledge, New York, 1993.
- Unisia, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan UNISIA*, No 32/XVII/IV/1997.

